



UPAYA YANG DILAKUKAN PADA MASYARAKAT PESISIR MENGENAI EKSPLOITASI MASYARAKAT DI DESA BIANGKEKE KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

Hasbiah¹, Husain.AS¹, Andi Annisa Sulolipu¹

¹Universitas Patempo Makassar, Indonesia

History Article

Article history:

Received Oct 17, 2023
Approved Nov 21, 2023

Keywords:

Efforts made by Coastal Communities, Community Exploitation

ABSTRACT

This research aims: 1). To find out and explain the efforts of coastal communities, especially fishermen, regarding community exploitation of coastal resources in Biangkeke Village, Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. This research will be carried out in Biangkeke Village, Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. This research basically describes and analyzes phenomena. social activity events, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. The development of coastal community institutions based on local resources will increase community participation in decision making and monitoring of resource potential management. Thus it will better guarantee the continuity of increasing income and preserving its resources. The method used is descriptive with a qualitative approach, which has natural characteristics (natural setting) as a direct, descriptive data source. The focus of the research is fishermen. This research basically describes and analyzes phenomena. social activity events, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. Solving problems that exist in research requires in-depth, regular and continuous investigation, in order to find out how the research steps should be. This is very important in the research process that is carried out in a planned and systematic manner. The results of this study indicate that 1). Counseling was held related to coastal areas, location utilization and land conversion in coastal areas right on the shoreline from residential areas to access for fishing boats to obtain natural resource products. 2.) Form farmer groups to empower coastal areas to plant seaweed seeds. 3.) Empowerment as a process of developing, becoming self-sufficient, self-help, strengthening the bargaining position of the grassroots community against pressure forces in all fields and sectors of life. An independent society as a participant means an open space and capacity to develop creative potential, control the environment and its own resources, solve problems independently, and participate in determining the political process in the realm of the state. The community participates in the process of development and governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan:1). Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya masyarakat pesisir, khususnya nelayan, mengenai eksploitasi masyarakat terhadap Sumber daya pesisir di Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena. peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan potensi sumberdaya. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan dan pelestarian sumberdayanya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif. Focus penelitiannya adalah nelayan. Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena. peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Pemecahan masalah yang ada pada penelitian diperlukan penyelidikan mendalam, teratu dan terus menerus, guna mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian. Hal tersebut sangat penting keberadaannya di dalam proses penelitian yang dilakukan secara terencana dan sistematis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Diadakan penyuluhan terkait daerah pesisir, pemanfaatan lokasi serta alih fungsi tanah di daerah pesisir persis di bibir pantai dari hunian menjadi akses perahu nelayan untuk mendapatkan hasil sumber daya alam. 2.)Membentuk kelompok tani untuk memberdayakan daerah pesisir guna melakukan penanaman bibit rumput laut. 3.)Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan..

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: Hasbiahbiah011@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul

kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana?, Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas - luasnya oleh masyarakat (Lippitt et. al., 2002).

Ketertinggalan dan keterbelakangan sebagian masyarakat pesisir jika dibandingkan dengan potensi Sumber daya pesisir yang dimiliki dapat diteliti dari berbagai segi, salah satunya adalah dari perilaku nelayan dan masyarakat pesisir lain dalam mengelola Sumber daya pesisir tersebut. Penelitian ini mengungkap berbagai faktor yang terkait dengan perilaku masyarakat pesisir dalam mengelola Sumber daya pesisir di Kecamatan Samatiga. Pemanfaatan sumber daya alam yang manaasi asa kelestarian diharapkan dapat menjamin ketersediaan Sumber daya pesisir di masa sekarang dan masa yang akan datang (Anggoro, 2004).

Masalah utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah adanya kesenjangan antara kepercayaan publik (public trust) seperti konservasi jangka panjang stok perikanan dan lingkungan ekologi dengan adanya keinginan tertentu dari pengguna "pemodal kuat" yang akan mengeksploitasi sumber daya tersebut (O'Connor, 2004).

Terdapat dua faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku nelayan memanfaatkan Sumber Daya Pesisir, yaitu faktor internal dan eksternal nelayan. Perilaku positif nelayan merupakan perilaku yang conform, yakni mengikuti prinsip ekonomi dan konservasi, sedangkan perilaku negatif adalah kegiatan destruktif yang akan berakibat buruk bagi kelestarian sumber daya alam.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi, di tengah gemerlapnya kekayaan alam nan melimpah ternyata Indonesia belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat disekitarnya yaitu masyarakat pesisir. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia namun kenyataannya masyarakat pesisir masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural (Kusnadi, 2002).

Salah satu penyebabnya adalah banyak pihak termasuk elit penguasa yang tidak mau bertanggungjawab terhadap kepentingan mereka dalam mengeruk sumberdaya lingkungan laut. Selain itu, penyebab yang timbul dari masyarakat setempat adalah ekosistem sumber alam lingkungan laut yang telah mengalami degradasi sebagai akibat eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan dan terkendali. Keawaman masyarakat tersebut adalah tantangan bagi para ahli untuk memperbaiki strategi hidup dan kearifan lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, semakin terasa bahwa untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pemahaman sosiologi masyarakat pesisir. Sosiologi masyarakat pesisir ini direkonstruksi dari basis sumberdaya dan bersumber pada aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya alam lingkungan laut.

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut (Sumber Daya Pesisir). Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan publik. Terdapat persoalan tertentu yang terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga masyarakat di kawasan pesisir masih tertinggal (Hanson, 2004).

Persoalan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat pesisir dialami pula di pesisir pantai selatan Bantaeng, yakni di wilayah Kecamatan Pa'jukukang. Pesisir Kecamatan Pa'jukukang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai, dengan potensi laut yang menjanjikan. Berkaitan dengan masalah perilaku tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengungkap perilaku masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dalam mengelola Sumber daya pesisir berdasarkan hasil analisis kritis terhadap berbagai variabel yang berhubungan dengan perilaku tersebut, (2) menjelaskan faktor-faktor pembentuk perilaku pengelola Sumber daya pesisir yang mempengaruhi kondisi Sumber daya pesisir dan kesejahteraan, dan (3)

menghasilkan model pengembangan masyarakat yang relevan dengan tipologi masyarakat pesisir di Kecamatan Pa'jukukang.

Permasalahan pengelolaan pesisir dan laut selama ini terjadi karena pola pendekatan pembangunan yang kurang mengakomodasi dan mengintegrasikan potensi lokal baik sumberdaya alam pesisir maupun sumberdaya manusia termasuk nilai-nilai kearifan lokal/tradisional.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini sering bersifat parsial dan berpola "top-down", sehingga sering kali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, tidak berpola "bottom-up", sedang dalam implementasinya kurang mendayagunakan potensi yang ada secara optimal termasuk nilai-nilai atau kearifan lokal.

Pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan potensi sumberdaya. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan dan pelestarian sumberdayanya.

Pemanfaatan sumberdaya yang kurang maksimal sampai saat ini, antara lain dikarenakan masih terdapat kendala yaitu skala usaha yang rata-rata kecil di bawah skala ekonomis, kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya penguasaan teknologi serta tingkat pemanfaatan sumberdaya yang kurang merata dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Keikutsertaan masyarakat dari awal dalam menentukan permasalahan akan lebih memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan yang demikian juga membuat masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab pada program tersebut sehingga lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk ikut mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Pada gilirannya metode pendekatan ini akan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu pada Masyarakat Nelayan di desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang diangkat oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

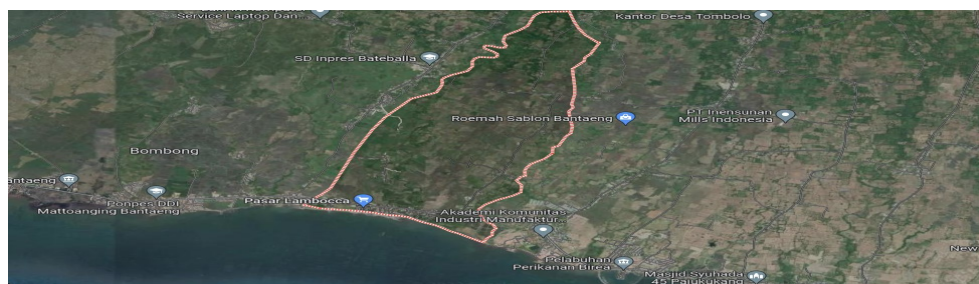
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Biangkeke adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Pajukukang, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki kode pos 92460. Desa ini memiliki luas 3,11 km. Dilansir dari Profil Desa Biangkeke, Biangkeke berasal dari nama sungai yang hulunya bernama Biangkeke yang terletak di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Sebutan Biangkeke pertama kali diucapkan oleh Karaeng Nonci, seorang tokoh masyarakat dan kemudian dijadikan sebagai nama kampung.



Secara Geografis Desa Biangkeke terletak di wilayah pemerintahan Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, Jarak dari Ibu kota Kecamatan sekitar 2 kilometer. Dan jarak dari Ibu kota kabupaten Bantaeng 15 kilometer. Jika menggunakan kendaraan bermotor ke kota maka jarak tempuh kecamatan sekitar 20 menit, dan sekitar 40 menit menuju Ibu kota kabupaten Bantaeng.

Batas secara administrasi yakni sebelah Utara dengan Desa Tombolo, Sebelah Timur Desa Nipa-Nipa, Sebelah Selatan Laut Plores dan Sebelah Barat Desa Lumpangan.

Sejak terbentuk desa, hingga saat ini Desa Biangkeke telah dinahkodai oleh 14 orang Kepala Desa.

Pa'jukukang	
Kecamatan	
Negara	 Indonesia
Provinsi	Sulawesi Selatan
Kabupaten	Bantaeng
Pemerintahan	
• Camat	-
Populasi	
• Total	- jiwa
Kode Kemendagri	73.03.05 
Luas	- km ²
Desa/kelurahan	-

Pa'jukukang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kecamatan Pa'jukukang adalah 48,9 km². Pada tahun 2020, wilayah Kecamatan Pa'jukukang terbagi menjadi 10 desa yang terletak di bagian pesisir. Kecamatan Pa'jukukang dilalui oleh beberapa bagian hilir sungai.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Pa'jukukang sebanyak 30.300 jiwa. Kecamatan Pa'jukukang merupakan kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2018. Komoditas utama di Kecamatan Pa'jukukang adalah produk perikanan antara lain udang, bandeng dan rumput laut. Di Kecamatan Pa'jukukang juga terdapat sebuah situs arkeologi bernama Situs Soerabaja.

2. Letak Geografi

Kecamatan Pa'jukukang terletak di Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kecamatan Pa'jukukang adalah 48,9 km². Persentase luas tersebut adalah 12,35% dari luas Kabupaten Bantaeng. Wilayah Kecamatan Pa'jukukang terbagi menjadi 10 desa. Pada tahun 2020, nama-nama desa di Kecamatan Pa'jukukang sebagai berikut:

Desa-desa di Kecamatan Pa'jukukang (2020)			
Nomor	Nama desa	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Desa Rappoa	3,25	6,65
2	Desa Biangloe	3,93	8,04
3	Desa Batu Karaeng	3,02	6,18
4	Desa Lumpangan	4,70	9,61
5	Desa Biangkeke	3,11	6,36
6	Desa Nipa-Nipa	6,12	12,52
7	Desa Pa'jukukang	5,85	11,96
8	Desa Borong Loe	9,40	17,18
9	Desa Papan Loe	7,35	15,03
10	Desa Baruga	3,17	6,48

Luas Kecamatan Pa'jukukang	48,90	100,00
-----------------------------------	--------------	---------------

3. Bentang alam

Wilayah Kecamatan Pa'jukukang merupakan daerah pesisir. Kecamatan Pa'jukukang dilalui oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Bungun Ru, Sungai Kalmassan, Sungai Tunrung Asu, Sungai Biangloe, Sungai Biangkeke dan Sungai Pamosa. Desa-desa di Kecamatan Pa'jukukang dilalui oleh Sungai Biangloe sebagai daerah hilirnya.

4. Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Pa'jukukang pada tahun 2015 sebanyak 30.113 jiwa. Kecamatan Pa'jukukang kemudian mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,62% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Pa'jukukang sebanyak 30.300 jiwa.

5. Kesejahteraan penduduk

Pada tahun 2018, Kecamatan Pa'jukukang menjadi kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Sebanyak 3.752 rumah tangga di Kecamatan Pa'jukukang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah pada tahun 2018. Persentase kesejahteraan penduduk miskin di Kecamatan Pa'jukukang pada tahun 2018 berada di bawah 40%

6. Sumber daya alam

Di Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pa'jukukang merupakan kecamatan penghasil komoditas perikanan yang terbesar. Produksi perikanan di Kecamatan Pa'jukukang melalui budidaya laut, tambak dan kolam. Komoditas perikanan yang utama di Kecamatan Pa'jukukang adalah udang, bandeng dan rumput laut.

7. Peninggalan arkeologi

Situs Soerabaja terletak di Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang. Titik koordinat dari Situs Soerabaja adalah 05° 33' 29,1" Lintang Selatan dan 120° 00' 19,3" Bujur Timur. Lokasinya di antara perkebunan jagung yang berdekatan dengan Sungai Biangkeke. Jaraknya sekitar 800 meter dari jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Bulukumba. Situs Soerabaja berupa sekumpulan batu andesit berbentuk bulat. Pola susunannya secara umum berbentuk persegi panjang yang menyerupai bentuk makam. Namun, di situs ini tidak ditemukan batu nisan.

8. Hasil Wawancara

a. Eksploitaasi

Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi adalah masyarakat memadatkan daerah pesisir pantai dengan bangunan, rumah tempat tinggal sehingga mengakibatkan kelompok nelayan tidak mempunyai lahan untuk memarkirkan perahu. Dengan melakukan eksploitasi pada lahan di pesisir pantai maka dapat mengakibatkan rusaknya atau menurunnya dari kualitas lingkungan, yang dimana kualitas lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kualitas penduduk/masyarakatserta indeks ekonomi masyarakat.

b. Upaya Yang Dilakukan

Bekerjasama dengan pemerintahan terkait penyuluhan daerah pesisir kepada masyarakat terkait lahan di bibir pantai guna kemaslahatan para nelayan, dikarenakan eksploitasi masyarakat terhadap sumber daya alam ini memiliki dampak yang besar terhadap kualitas penduduk/masyarakat terlebih-lebihnya untuk para nelayan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa seharusnya sumber daya pesisir pada bidang perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan juga memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai penggerak utama bagi perekonomian masyarakat.

Mengadakan alih fungsi lahan pemukiman penduduk dengan daerah parkir perahu para nelayan, agar mobilitas akses para nelayan dalam mengungusng pendapatan ekonomi mereka lebih mudah dan lebih kondusif. Agar pendapatan ekonomi masyarakat

dapat lebih baik diadakan pembentukan kelompok-kelompok tani guna memanfaatkan daerah pesisir pantai dalam penanaman bibit rumput laut.

c. Dampak

Dengan dibangunnya pemukiman warga di daerah pesisir pantai secara besar maka dampak dari itu hilangnya parkir perahu disebabkan pembangunan rumah persis di pinggir/bibir laut.

Akses melakukan kegiatan pencarian ekonomi masyarakat agak sulit dengan lahan parkir kapal yang sangat minim, serta keadaan lingkungan yang kurang baik.

B. Pembahasan

Eksplorasi masyarakat pesisir Terhadap Sumber daya pesisir Nelayan di Desa Biangkeke, sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. Selain itu, pendapatan yang diterima dari hasil tangkapan ikan tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Pada tanggal 11 Juni hasil dari wawancara bersama Bapak responden salah satu pekerja nelayan mengatakan: "Eksplorasi sumber daya alam yang terjadi adalah masyarakat memadatkan daerah pesisir pantai dengan bangunan, rumah tempat tinggal sehingga mengakibatkan kelompok nelayan tidak mempunyai lahan untuk memarkirkan perahu".

Pada konteks sumber daya pesisir dan pesisir control manusia ini juga dibatasi oleh sifat sumber daya alamnya yang bersifat barang public. Maka dari itu, upaya control yang dilakukan seseorang ini atau eksploitasi yang dilakukan ini dapat menimbulkan konflik dengan orang lainnya. Dengan melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran atau tidak terkendali dapat mengakibatkan rusaknya atau menurunnya dari kualitas lingkungan, yang dimana kualitas lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kualitas penduduk/masyarakat serta indeks ekonomi masyarakat.

Tanpa adanya sentuhan pemerintah terkait penyuluhan daerah pesisir kepada masyarakat terkait lahan di bibir pantai guna kemaslahatan para nelayan, maka eksploitasi masyarakat terhadap sumber daya alam ini memiliki dampak yang besar terhadap kualitas penduduk/masyarakat terlebih-lebihnya untuk para nelayan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa seharusnya sumber daya pesisir pada bidang perikanan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan juga memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai penggerak utama bagi perekonomian masyarakat."

Sementara untuk masalah dampak setelah adanya eksploitasi pesisir yang dilakukan, Bapak responden juga mengatakan: "dengan dibangunnya pemukiman warga di daerah pesisir pantai secara besar maka dampak dari itu hilangnya parkir perahu disebabkan pembangunan rumah persis di pinggir/bibir laut, tandingan kepada para nelayan".

Hasil wawancara bapak Tutu salah satu anggota kelompok Nelayan di desa Biangkeke, mengutarakan: "adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat menguasai sumber daya alam perikanan baik dalam bentuk badan hukum ataupun dalam bentuk perseorangan, hal tersebut dapat ikut mengurus sumber daya alam perikanan yang ada di daerah pesisir".

Eksplorasi masyarakat terhadap daerah pesisir desa yang dilakukan tanpa pengetahuan mendalam masyarakat atau para nelayan sekitar desa. Sehingga terjadi pengurangan kelompok nelayan serta minimnya kemauan masyarakat untuk menjadi nelayan dikarenakan kapal tidak tahu mesti diparkir dimana, dengan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan memiliki dampak secara langsung terhadap rusaknya alam atau rusaknya lingkungan yang dimana rusaknya lingkungan ini dapat mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup manusia". Dalam hasil wawancara tersebut bahwa eksploitasi daerah pesisir banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar yang melanjutkan pembangunan di bibir pantai, kelompok nelayan sebenarnya sudah mulai digerakkan serta diberapa titik sudah terbentuk, baiknya kegiatan ini kelangsungan ekonomi di Desa Biangkeke sudah terlihat baik dengan ditunjukkan dari hasil tangkapan yang dapat memenuhi kebutuhan harian nelayan serta mendapatkan lahan kerja.

Untuk pemerintah daerah harus selalu melakukan control atau pengawasan secara berkala terhadap perlakuan masyarakat yang tidak bertanggung jawab guna terhindarnya

aktivitas eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya pesisir, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan, terkait pemberian informasi, pengolahan hasil tangkapan dan pemberian modal dari pemerintah.

Tindakan pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan ketidak keseimbangan pendapatan atau ketimpangan pendapatan nelayan di desa Biangkeke. Hasil yang bisa dilakukan pemerintah dapat berbentuk memberikan program kerja nelayan dan sekaligus memberikan bantuan kepada nelayan berupa perahu, mesin, dan lain-lainnya. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah anak.

Dampak Kegiatan Eksploitasi daerah pesisir Terhadap Perekonomian Nelayan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai dampak adanya eksploitasi pesisir di Desa Biangkeke terhadap perekonomian nelayan serta penjelasan mengenai konsep eksternalitas yang dapat dianalisis yakni Eksternalitas positif adalah keuntungan bagi kelompok yang sudah terbentuk, pemanfaatan daerah pesisir bias disupport dengan kegiatan penanaman rumput laut serta dalam pemanfaatan lingkungan alam sekitar.

Dari hasil analisis diatas penulis dapat mengemukakan upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Diadakan penyuluhan terkait daerah pesisir, pemanfaatan lokasi serta alih fungsi tanah di daerah pesisir persis di bibir pantai dari hunian menjadi akses perahu nelayan untuk mendapatkan hasil sumber daya alam.
2. Membentuk kelompok tani untuk memberdayakan daerah pesisir guna melakukan penanaman bibit rumput laut.
3. Mengusulkan program-program pemerintah tersebut antara lain : motorisasi armada nelayan skala kecil, penerapan sistem rantai dingin (cold chain system), pembangunan prasarana perikanan, dan sebagainya. Program lain yang berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup adalah pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi kawasan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destruktif adalah program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Demikian juga pola usaha yang secara marak dikembangkan di hampir seluruh Indonesia adalah perikanan inti rakyat, suatu sistem usaha dimana nelayan sebagai plasma bermitra dengan perusahaan sebagai inti. Namun demikian bisa juga dikatakan bahwa upaya-upaya dari sisi kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang jelas menguntungkan nelayan.
4. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat pesisir

1. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga. Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber-daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self financing mechanism). Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya collateral, insurance dan equity.
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna. Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar. Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya.
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompokkelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan suatu aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu.

Dengan terbentuknya kelompok tani maka ada manfaat yang bias diraih adalah dapat Membuka Lapangan Kerja di Desa Biangkeke karena keadaan geografi di daerah desa Biangkeke yang tersun dengan lahan produktif di pesisir pantai yang kaya akan alam memungkinkan masyarakatnya untuk mengeksploitasi kekayaan yang telah disediakan oleh alam untuk dikelola. Kesempatan kerja di Daerah Desa Biangkeke semakin terbuka setelah adanya kegiatan Pengerukan lahan yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendidikan masyarakat daerah desa Biangkeke yang masih tergolong rendah, tidak memungkinkan masyarakatnya untuk dapat bekerja di tempat lain yang rata-rata menerapkan standarisasi minimal SLTA dan memiliki kecakapan khusus. Sehingga masyarakat dengan pendidikan yang rendah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya pemanfaatan lahan daerah pesisir masyarakat di desa Biangkeke yang berpendidikan rendah dapat diserap secara signifikan mengurangi pengangguran di desa Biangkeke tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan di pesisir Desa Biangkeke Dalam memiliki tingkat kepentingan tergolong tinggi yang ditunjukkan dengan besarnya pengaruh kegiatan pemanfaatan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi dampaknya terhadap sumber daya pesisir akibat kegiatan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan menjadi ancaman yang serius, sedangkan tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir rendah yang ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat pada tahap implementasi dan pemantauan.
2. Faktor-faktor pendidikan, persepsi dan pendapatan yang membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat pemanfaat pesisir, sedangkan faktor umur tidak berperan dalam membedakan kelompok tingkat peran serta masyarakat.

3. Strategi meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah dengan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (co-management), dengan masyarakat memiliki kewenangan cukup dalam pengelolaan dan terakomodasinya kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan.
4. Melakukan pendekatan yang komprehensif yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir, berupa kebijakan pemerintah dalam hal pengalihan fungsi yaitu memberilahan untuk kapal melakukan parkir serta pembukaan lahan pemukiman bagi warga agar kepadatan di pesisir pantai berkurang. Dengan tujuan adalah untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang diperoleh dari kawasan pesisir dan meminimalkan dampak negatif dalam pengelolaan kawasan pesisir, baik pada sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidup.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti
 - a) Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadaan sosial – ekonomi masyarakat nelayan di desa Bangkeke Kabupaten Bantaeng. Dan diharapkan dari penelitian ini pemerintah kota khususnya bidang perekonomian lebih memberi perhatian lebih pada masyarakat nelayan yang ada di Desa Biangkeke demi terciptanya kerjasama dari pemerintah ke daerah-daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada hal pemanfaatan sumber daya pesisir.
 - b) Peneliti selanjutnya dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Pendidikan karakter, kreativitas nelayan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta motivasi belajar terhadap sumber daya daerah pesisir.
2. Pemerintah
 - a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pemerintah agar Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri, mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.
 - b) Menyediakan lahan pemukiman bagi warga agar akses nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat direalisasikan dengan baik.
5. Pendidikan Ekonomi
 - a) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kadaster daerah pesisir di Indonesia ini, khususnya variabel-variabel kendala secara kualitatif dan kuantitatif
 - b) Berkaitan dengan hal inventarisasi, diperlukan suatu sistem informasi dengan basis data untuk mengintegrasikan serta menyimpan hasil proses perpetaan dalam bentuk digital yang dapat merealisasikan hasil daerah pesisir.
 - c) Untuk penelitian selanjutnya untuk mengoptimalkan diharapkan mampu menganalisis semua objek-objek ruang perairan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Apun, Budhiman., Hary, Christijanto., Siti., Kamarijah, Ganef, Hari, Budoyo. (2010) Penentuan Insikator Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Bogor: Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, WWF-Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.
- Arifin, Rudyanto (2004) Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Jakarta: Bappenas.
- Berkes, F., Folke, C. (Eds.), (1998) Linking Social and Ecological Systems, Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience. Cambridge University Press, Cambridge.

- Berkes, F., Folke. Evolution of co- management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management* 90 (2009) 1692–1702
- Carlssona, Lars & Berkesb Fikret. (2005) Co- management: concepts and methodological implications. *Journal of Environmental Management* 75, 65–76
- Cundill, Georgina & Christo Fabricius. (2009) Monitoring in adaptive co-management: Toward a learning based approach. *Journal of Environmental Management* 90, 3205–3211
- Grazia Borrini-Feyerabend., M. Taghi Farvar., Jean Claude Nguingui and Vincent Awa Ndangang. (2007). Co-management of Natural Resources Organising, Negotiating and Learning-by-Doing. Heidelberg (Germany): Reprint 2007 [first publication]
- Luky Adrianto & Dede Hartoto (2009) Fundamentals of fisheries co- management in Indonesia. Course book. Rome, Italy : Electronic Publishing Policy and Support Branch Communication Division
- Nies, Suk. (2000) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. LAN. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU- VIII/2010, h, 164-165
- Singleton, S. (1998) Constructing Cooperation: the Evolution of Institutions of Comanagement. University of Michigan Press, Ann Arbor.
- Suseno. (2007) Menuju Perikanan Berkelanjutan. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka Cidesindo.
- Sweeden, Paula., Batker Deve., RadtkeHans., Boumans Roelof., Willer Chuck. (2008) An Ecological Economics Approach to Understanding Oregon's Coastal Economy and Environment. Oregon: Coast Range Association. h, 37
- Adibroto, T.A. (1999). Managing the Indonesia Marine and Coastal Environment : The Role of Monitoring Activities. Proceeding no. 979 – 8465 – 07 – 5 Workshop on Technology Application on Marine Environmental Monitoring, Forecasting and Information System. Institutional Framework and Project Benefits, 17 November 1999. Jakarta. Indonesia.